



Tinjauan Literatur: Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia

Rizan Hasbullah^{1*}, Wahib Assyahri², Diga Putri Oktaviane³, Andy Riski Pratama⁴

^{1,2,3,4} Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia

Email: Rizanhasbullah09@gmail.com¹, wassyahri.wa@gmail.com², lingga091086@gmail.com³, andyrezky24@gmail.com⁴,

Alamat: Jl. Tan Malaka, Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26138

Korespondensi penulis: Rizanhasbullah09@gmail.com

Abstract. *The People's Palm Oil Replanting Program (PSR) is a national policy aimed at improving the productivity of smallholder plantations through the replanting of aging and unproductive oil palm trees. This study reviews the implementation of PSR in Indonesia by analyzing ten scholarly articles through a literature study approach. The findings indicate that program effectiveness is significantly influenced by technical support such as training, mentoring, the application of Good Agricultural Practices (GAP), and strategic partnerships for harvest absorption. However, implementation faces several challenges, including limited human resources, damaged equipment, inadequate funding, prolonged replanting periods, weak coordination among stakeholders, and lack of policy dissemination. Local institutions such as cooperatives (KUD) and farmer groups (Gapoktan) play crucial roles in ensuring program sustainability and inclusiveness by acting as managers and conflict mediators. Although farmers are generally ready and actively participate, regulatory constraints—particularly the requirement of financial guarantors—remain a barrier. The study recommends strengthening local institutional capacity, enhancing stakeholder synergy, and simplifying financial schemes as strategic steps to improve the long-term effectiveness of the PSR program.*

Keywords: *Program Effectiveness, Institutional Role, Farmer Participation*

Abstrak : Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit rakyat melalui peremajaan tanaman tua dan tidak produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program PSR di Indonesia melalui pendekatan studi literatur terhadap sepuluh artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas program PSR dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti dukungan teknis berupa pelatihan, pendampingan, penerapan Good Agricultural Practices (GAP), serta kemitraan dalam penyerapan hasil panen. Di sisi lain, terdapat berbagai kendala implementasi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kerusakan alat, minimnya anggaran, lamanya proses replanting, lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan, dan kurangnya sosialisasi kebijakan. Peran kelembagaan lokal seperti KUD dan Gapoktan sangat penting dalam menjamin keberlanjutan dan inklusivitas program, baik sebagai pengelola maupun mediator konflik. Meskipun petani menunjukkan kesiapan dan partisipasi tinggi, hambatan regulatif seperti keharusan adanya avalis masih menjadi tantangan. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, peningkatan sinergi antar aktor, serta penyederhanaan skema pembiayaan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program PSR.

Kata kunci: Efektivitas Program, Kelembagaan Lokal, Partisipasi Petani

1. LATAR BELAKANG

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi sub-sektor perkebunan. Sebagai komoditas strategis, perannya tidak hanya terbatas pada aspek agribisnis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pengembangan kelapa sawit antara lain memberi manfaat dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat, produksi yang menjadi bahan baku industri pengolahan yang

menciptakan nilai tambah di dalam negeri, ekspor CPO yang menghasilkan devisa dan menyediakan kesempatan kerja (Ganadi et al., 2023)

Besarnya peran kelapa sawit ini juga terlihat dari posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri global. Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, hal ini berdasarkan data statistik perkebunan unggulan nasional 2021–2023 Kementerian Pertanian, jumlah produksi minyak kelapa sawit nasional sebesar 48,23 juta ton pada tahun 2023 meningkat 5,82% dari 45,58 juta ton tahun 2022. Minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor nonmigas terbesar di Indonesia, pada tahun 2021 ekspor produk CPO dan turunannya mencapai 27,06 juta ton dengan nilai sebesar 28,72 Milyar USD, negara tujuan utama ekspor CPO dan turunannya antara lain Cina, India, Pakistan, Amerika, Malaysia, Bangladesh, Singapura, dan Belanda (RI, 2024). Selain dapat menciptakan lapangan kerja baru, industri kelapa sawit juga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pungutan ekspor minyak kelapa sawit (Nurkamila & Mayarni, 2024)

Namun demikian, di tengah capaian tersebut, kondisi perkebunan rakyat menunjukkan tantangan yang cukup besar. Kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dengan luas kebun sawit rakyat mencapai 6,02 juta ha pada tahun 2021, produktivitasnya hanya mencapai 15,5 juta ton CPO per tahun. Berbeda sekali dengan perkebunan besar swasta yang menguasai 8,04 juta ha, produktivitas bisa mencapai 27,4 juta ton CPO per tahun. Kesenjangan ini menandakan bahwa sistem pengelolaan dan dukungan terhadap petani swadaya masih memerlukan penguatan. Rendahnya pencapaian tersebut bisa mengancam masa depan sawit nasional jika semua pihak tidak melakukan langkah komprehensif. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat adalah melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) (Qodriyatun, 2023)

Program PSR menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan industri sawit, khususnya di tingkat petani. Peremajaan atau replanting adalah upaya keberlanjutan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman yang sudah berumur 25 tahun, tanaman dengan tinggi yang sudah melebihi 12 meter, tanaman bibit tidak unggul, tingkat produktivitas kurang dari 10 ton TBS/ha/tahun pada umur tanaman minimal 7 tahun, dan jumlah tegakan per hektar kurang dari 80 pokok dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap termasuk penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah (Panggabean et al., 2023)

Dalam mendukung program ini, aspek regulasi dan kebijakan menjadi faktor pendukung utama. Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit

sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 jo Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan perundangan tersebut, menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan (Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan, 2017).

Sebagai bentuk komitmen konkret, pemerintah juga telah mengalokasikan sumber daya fiskal yang cukup besar melalui lembaga pengelola dana. Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), telah menggelontorkan dana hingga Rp7,5 triliun sepanjang 2016–2022 untuk program PSR tersebut. Bahkan, pemerintah menargetkan program PSR dapat mencapai 540 ribu ha dalam kurun waktu 2017–2023 dengan target per tahun 180 ribu ha. Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi PSR hingga akhir tahun 2022 baru mencapai 278,2 ribu ha. Gap antara target dan realisasi ini menunjukkan masih terdapat hambatan struktural dalam implementasinya. Rendahnya realisasi program PSR dikarenakan, antara lain, masih ditemukannya fragmentasi birokrasi (penyebaran tanggung jawab dalam kegiatan PSR yang membutuhkan adanya koordinasi), rendahnya minat masyarakat terhadap peremajaan sawit rakyat, sulitnya mendapatkan lahan yang cukup untuk ditanami bibit unggul karena faktor legalitas lahan (lahan kebun sawit rakyat banyak yang berada di kawasan hutan), lemahnya kelembagaan pekebun dalam pengelolaan kegiatan, dan kurangnya dukungan kalangan swasta (Qodriyatun, 2023)

Melihat berbagai dinamika di atas, tampak bahwa pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) memegang peran krusial dalam menjawab tantangan produktivitas perkebunan sawit rakyat di Indonesia. Meskipun program ini telah didukung dengan kebijakan dan pendanaan yang memadai, namun tingkat implementasinya masih belum optimal. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami lebih jauh berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program PSR, baik dari sisi regulasi, koordinasi antar-lembaga, kesiapan petani, legalitas lahan, hingga peran dukungan teknis dan pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada kajian literatur mengenai implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat di Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tren, pendekatan, serta tantangan utama dalam pelaksanaannya. Dengan menelaah berbagai sumber ilmiah dan kebijakan yang relevan, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan responsive.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi berbasis tinjauan pustaka, di mana tinjauan tersebut memuat pemaparan teoritis serta temuan yang diambil dari jurnal ilmiah dan sumber-sumber penelitian lainnya. Tinjauan pustaka adalah metode untuk menemukan, menilai, dan menafsirkan materi yang diterbitkan sebelumnya secara sistematis (Yanti, 2023). Sumber-sumber ini menjadi dasar dalam menyusun kerangka pemikiran yang mengarah pada perumusan masalah yang akan dianalisis. Peneliti melakukan analisis terhadap berbagai kajian terdahulu, yang kemudian disintesis menjadi rangkuman temuan yang telah ditelaah kembali.

Hasil dari proses ini mencakup informasi seperti judul, tahun terbit, metode, serta hasil penelitian yang dikaji. Selanjutnya, peneliti melakukan pendalaman terhadap isi kajian tersebut guna merumuskan poin-poin penting yang relevan untuk dijadikan bahan pembahasan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji 10 artikel penelitian untuk dapat memahami secara mendalam terkait bagaimana Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dari program ini.

Tabel 1. Artikel yang direview

No	Nama Peneliti & Tahun Terbit	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Sonia Ramadhani Hutasuhut, Sri Fajar Ayu, Diana Chalil (2023)	Analisis Efektivitas Program Peremajaan Sawit Rakyat Di Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Indonesia	Metode Kuantitatif	Hasil Penelitian Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) Diperoleh Bahwa Kelompok Tani Berkemitraan Dengan Perusahaan Y Lebih Baik Dibandingkan Dengan Perusahaan X. Perusahaan Y Melakukan Pelatihan Dan Pendampingan Dari Pembinaan Bibit Hingga Penerapan GAP (Good Agricultural Practices) Dan Dilakukannya Monitoring Secara Berkala Ke Kebun Kelapa Sawit Serta Adanya Kerjasama Dalam Menampung Hasil Pertanaman Dari Pekebun Sehingga Menghasilkan Nilai Efektivitas Yang Lebih Baik.
2	Ronal Dison, Dewi Wulansari (2019)	Evaluasi Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan (Replanting) Perkebunan Kelapa Sawit Di Dusun Lembah Kuamang Tahun 2019	Metode Kualitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Adapun Kendala Dalam Pelaksanaan (Replanting) Perkebunan Kelapa Sawit Didusun Lembah Kuamang Tahun 2019 Adalah Tenaga Kerja Yang Mana Terputusnya Komunikasi Kepada Pihak Kontaraktor Dalam Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pihak Koperasi Unit Desa Dan Rusaknya Alat Exseparator Untuk Pengerjaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. Yang Mana Terdapat Dalam Pasal 4 Ayat 1 Yang Belum Teralisasi Dengan Baik Di Dusun Lembah Kuamang. Upaya Yang Dilakukan Adalah Memberikan Surat

				Kepada Pihak Kontraktor, Memutuskan Kontrak Kepada Pihak Operator, Apabila Bibit Sawit Masyarakat Ada Yang Mati Maka Pihak Koperasi Unit Desa Memberikan Bibit Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Uang Mandiri/Uang Sendiri.
3	Rizki Amalia, Ratnawati Nurkhoiry, Zulfi Prima Sani Nasution, Dan Ambar Kurniawan (2017)	Analisis Kesiapan Petani Dan Koperasi Dalam Program Peremajaan Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit (Studi Kasus Petani Lingkup Ophir, Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat)	Metode Kuantitatif	Kesiapan Petani Dalam Mengikuti Program Peremajaan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Dinilai Melalui Tiga Kriteria, Yaitu Analisis Kemampuan Petani Dalam Melunasi Hutang (Ability To Repay Of Debt), Analisis Iktikad Baik Petani Dalam Berorganisasi (Good Faith To Join Community), Dan Analisis Penilaian Kapasitas Koperasi (Cooperative Capacity).Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Petani KPS Lingkup Ophir Pada Dasarnya Siap Dan Layak Dalam Memperoleh Pembiayaan Maupun Mengikuti Program Peremajaan Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit, Namun Akses Terhadap Pembiayaan Dan Regulasi Yang Mengharuskan Adanya Avalis Menjadi Kendala Dalam Kegiatan Replanting Kebun Petani.
4	Pipin Dwi Astiti, A. Faroby Falatehan, Dan Eka Intan Kumala Putri (2022)	Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (Studi Kasus: Kud Tunas Muda Kabupaten Siak-Riau)	Metode Kualitatif	Hasil Analisis Persepsi Petani Menunjukkan Aspek Input, Aspek Finansial Dan Aspek Kelembagaan Yang Berpengaruh Pada Keputusan Petani Dalam Pelaksanaan Peremajaan. Aspek Keterlibatan Stakeholder Terdiri Dari 3 Komponen Sub Aspek Yaitu: Stakeholder Terkait, Hak Stakeholder Dan Kewajiban Stakeholder. Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Melalui Program PSR Sangat Membantu Petani Kelapa Sawit Dan Program PSR Ini Hanya Dapat Diterima Oleh Petani Kelapa Sawit Yang Tergabung Dalam Keanggotaan KUD Tunas Muda.
5	Devi Ayu Hardiningsih, Dadang Mashur (2023)	Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Bhakti Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	Metode Kualitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan Program Sudah Berjalan Dengan Baik Hanya Terdapat Beberapa Kekurangan Program Yang Belum Dapat Terpenuhi. Adapun Faktor Penghambatnya ialah Koperasi Unit Desa Marga Bhakti Yang Belum Dapat Membuat Program Terbaru Bagi Anggota Yang Tidak Mengikuti Program Untuk Tetap Menunjang Pendapatan Mereka Agar Tetap Baik.
6	Bunga Febrida Sari, Panca Setyo Prihatin (2024)	Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Perternakan Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	Metode Kualitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Potensi Lahan Untuk Peremajaan Sawit Di Kecamatan Ukui Mencapai 4.495 Ha Yang Tersebar Di 8 Koperasi Unit Desa (KUD). Pemerintah Kabupaten Pelalawan Menyediakan Bantuan Biaya Peremajaan Sebesar Rp 30 Juta Per Hektar Bagi Petani. Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat Telah Berjalan Dengan Baik, Namun Masih Terdapat Beberapa Kendala Seperti Keterbatasan Anggaran, Waktu Proses Peremajaan Yang Relatif Lama, Dan Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Petani. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi

				Kendala Tersebut Adalah Mengoptimalkan Penggunaan Dana BPD PKS, Mempercepat Proses Peremajaan, Serta Meningkatkan Sosialisasi Dan Komunikasi Dengan Petani.
7	Azizah Maharani, Bambang Shergi Laksmono (2021)	Peran Gapoktan Karya Bersama Dalam Implementasi Peran Gapoktan Karya Bersama Dalam Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Di Bandar Program Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Di Bandar Durian, Aek Natas, Labuhan Batu Utara	Metode Kualitatif	Hasil Dari Penelitian Ini, Yaitu Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Mengikuti Program PSR, Ketua Kelompok Tani Harus Meyakinkan Para Petani Sawit Bahwa Program Dapat Berjalan Dengan Baik. Selama Menjalankan Program PSR, Komunikasi Dan Koordinasi Antara Gapoktan Dan Dinas Pertanian Berjalan Dengan Baik, Di Mana Penyuluh Memiliki Peran Yang Penting Dalam Menghubungkan Komunikasi Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian. Namun, Terdapat Sedikit Miskomunikasi Dengan Kemitraan, Yaitu Mengenai Pembuatan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) Dan Pelaksanaan Di Lapangan. Dalam Mobilisasi SDM Dan Manajemen, Pengetahuan Petani Yang Kurang Menyebabkan Pengelolaan Manajemen Administrasi Menjadi Belum Maksimal. Program PSR Pun Tidak Terlepas Dari Adanya Konflik Sehingga Diperlukan Mediasi Konflik, Yaitu Pada Tahap Tiga, Kelompok Tani Sudah Tidak Akan Menggunakan Kemitraan, Sebab Mereka Sudah Berpengalaman Dan Dapat Mengelola Dana Hibah Secara Mandiri. Rekomendasi Dari Penelitian Ini, Yaitu Diperlukan Penguatan Kelembagaan Sehingga Petani Dapat Menjadi Petani Mandiri Yang Dapat Menjalankan Programnya Sendiri Serta Perlu Adanya Tupoksi Yang Jelas Dari Masing-Masing Stakeholders Dari Program PSR
8	Muhamad Hafiz Arrofi	Implementasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Kualitas Sawit Rakyat Di Kabupaten Kotawaringi Barat Provinsi Kalimantan Tengah	Metode Kualitatif	Implementasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Sudah Berjalan Dengan Baik, Meskipun Masih Ada Beberapa Kendala. Oleh Karena Itu Diperlukan Upaya Yang Harus Dilakukan Yaitu Menyediakan Layanan Khusus Atau Meningkatkan Intensitas Sosialisasi Ketentuan Dan Aturan Untuk Mengikuti Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat
9	Retno Syafira, Zulkifli Nasution, Charloq (2024)	Analisis Kendala Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Terhadap Potensi Pertumbuhan Ekonomi Petani Sawit Rakyat.	Metode Kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Administrasi Dan Sumber Daya Manusia Memiliki Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Petani Sawit Rakyat. Sementara Itu, Lahan Kelapa Sawit, Sarana Dan Prasarana, Serta Sustainability Tidak Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Petani Sawit Rakyat. Penelitian Ini Berimplikasi Bahwa Pentingnya Peningkatan Pelatihan Dan Dukungan Teknis Bagi Pendamping Dan Petani Sawit Rakyat. Pemerintah Perlu Menyediakan Pembiayaan Dan Insentif Untuk Mendorong Partisipasi Petani Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat. Diperlukan Strategi Pertumbuhan

				Ekonomi Yang Holistik, Seperti Diversifikasi Produk Kelapa Sawit, Peningkatan Rantai Nilai, Dan Integrasi Dengan Sektor Lain. Perlu Membangun Kerjasama Yang Kuat Dengan Stakeholder Terkait Untuk Meningkatkan Implementasi Program Dan Memaksimalkan Manfaat Ekonomi Bagi Petani Sawit Rakyat.
10	Faisal Husni Asidiq, Yossie Yumiati Dan Ana Nurmali (2023)	Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah	Metode Kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program Replanting Kelapa Sawit Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Memiliki Rata-Rata Sebesar 76 Yang Berarti Bahwa Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Termasuk Dalam Kategori Tinggi. Umur (X1), Penerimaan (X3), Pendidikan Non Formal (X4), Jumlah Tanggungan (X5), Orientasi Masa Depan (X6) Berpengaruh Terhadap Partisipasi Petani, Namun Pendidikan Formal (X2) Tidak Berpengaruh Secara Parsial (Individual).

Berdasarkan 10 artikel diatas, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 topik, diantaranya (1) Evaluasi Efektivitas Program Peremajaan sawit rakyat, (2) Kendala implementasi program PSR, (3) Peran kelembagaan dalam menjalankan program PSR (Koperasi Unit Desa dan Gapoktan), (4) Persiapan dan partisipasi petani dalam Program PSR.

Pada topik pertama terkait Evaluasi Efektivitas Program Peremajaan Sawit Rakyat. Penelitian oleh (Hutasuhut et al., 2023) mengevaluasi efektivitas Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan menggunakan indikator model CIPP (Context, Input, Process, Product) dan membandingkannya dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh perusahaan mitra.

Pada topik kedua terkait Kendala Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat. Beberapa studi mengidentifikasi kendala dalam implementasi PSR. Dalam penelitian (Dison & Wulansari, 2021) menemukan kendala teknis di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan alat, serta mengusulkan solusi darurat melalui peran Koperasi Unit Desa (KUD). Di sisi lain (Sari & Prihatin, 2024) menguraikan kendala struktural seperti masalah anggaran, waktu, dan koordinasi antar-pemerintah daerah. Temuan (Arrofi, 2022) menyoroti pentingnya sosialisasi program, sementara (Syafira et al., 2024) membuktikan adanya pengaruh signifikan kendala administrasi dan SDM terhadap ekonomi petani peserta PSR.

Pada topik ketiga mengenai Peran Kelembagaan dalam Implementasi Program PSR, Peran kelembagaan menjadi faktor krusial dalam kesuksesan PSR. (Asti et al., 2022) menganalisis pengaruh syarat keanggotaan KUD terhadap akses petani ke program. Penelitian (Devi Ayu Hardiningsih & Dadang Mashur, 2023) mengungkap keterbatasan KUD dalam mengembangkan program pendukung PSR, sedangkan (Maharani & Laksmono, 2021)

menyoroti peran Gapoktan sebagai mediator konflik dan penggerak mobilisasi sumber daya manusia di tingkat lapangan.

Dan topik keempat terkait Persiapan dan Partisipasi Petani dalam Program PSR. Kesiapan dan partisipasi petani turut menentukan keberhasilan PSR. (Amalia et al., 2017) menilai kesiapan petani berdasarkan kemampuan finansial dan komitmen (itikad) mereka. Sementara itu, (Husni Asidiq et al., 2022) mengukur tingkat partisipasi aktual petani dan menganalisis faktor demografis yang memengaruhinya.

Keempat topik tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk gambaran menyeluruh tentang kompleksitas implementasi Program PSR. Dengan memahami hubungan antara efektivitas program, hambatan implementasi, peran kelembagaan, serta kesiapan dan partisipasi petani, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PSR tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan adaptif aktor lokal dalam mengelola dinamika lapangan yang terus berkembang.

Efektivitas Program Peremajaan sawit rakyat,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Peremajaan Sawit Rakyat secara umum dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Keunggulan program tercermin melalui adanya pelatihan, pendampingan teknis, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), serta monitoring yang dilakukan secara berkala.

Selain itu, kemitraan dalam hal penyerapan hasil panen turut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program. Temuan ini menegaskan bahwa dukungan teknis yang berkelanjutan serta kemitraan yang strategis merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat.

Namun demikian, efektivitas tersebut tidak terjadi secara otomatis, melainkan sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan lokal dalam menyediakan layanan pendukung secara konsisten. Pelatihan dan pendampingan, misalnya, tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga mekanisme koordinasi dan pembiayaan yang stabil. Begitu pula, kemitraan strategis akan sulit terwujud tanpa adanya kejelasan peran antar-aktor serta kontrak yang adil bagi petani rakyat. Dengan demikian, efektivitas program PSR pada dasarnya adalah cerminan dari tata kelola program yang kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Analisis ini memperkuat asumsi bahwa pendekatan teknis saja tidak cukup, melainkan harus didukung oleh desain kelembagaan dan kebijakan yang adaptif.

Kendala implementasi program PSR

Implementasi atau pelaksanaan program Peremajaan sawit rakyat berdasarkan artikel yang telah didapatkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelaksanaan program

peremajaan sawit rakyat ini sudah dilaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tentu akan menemukan kendala.

Berikut kendala implementasi yang dirangkum dari artikel yang telah direview. (1) Sumber Daya Manusia, perlu adanya pelatihan dan dukungan teknis bagi pendamping dan juga petani (2) Rusaknya alat, tentu ini akan berdampak pada waktu pengerjaannya (3) Keterbatasan anggaran, dalam hal ini sangat mempengaruhi implementasi PSR (4) Waktu proses peremajaan yang begitu lama, dalam hal ini petani tentunya akan memikirkan Kembali, jika dilakukan peremajaan pada sawit, tentu akan mempengaruhi ekonomi, hal dikarenakan peremajaan yang relative lama (5) Masih kurangnya koordinasi anatar pemerintah daerah dengan petani (6) Sosialisasi terkait ketentuan dan aturan dari Program PSR.

Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menunjukkan capaian positif, namun dihambat enam kendala kritis: (1) kapasitas SDM terbatas, (2) infrastruktur alat rusak, (3) masalah anggaran, (4) durasi peremajaan panjang (>3 tahun) yang menurunkan pendapatan petani, (5) koordinasi pemerintah-petani lemah, dan (6) sosialisasi regulasi tidak optimal.

Keenam kendala tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Program PSR tidak hanya dihadapkan pada masalah teknis, tetapi juga pada hambatan struktural dan kelembagaan. Keterbatasan sumber daya manusia dan kerusakan alat menunjukkan lemahnya kesiapan operasional di tingkat lapangan. Sementara itu, persoalan anggaran dan durasi peremajaan yang panjang menimbulkan keraguan di kalangan petani terhadap keberlanjutan ekonomi mereka, sehingga partisipasi menjadi terkendala secara psikologis maupun finansial.

Lebih jauh, lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan petani, serta minimnya sosialisasi mengenai regulasi dan prosedur, mengindikasikan kurangnya komunikasi yang efektif dalam proses implementasi. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan tata kelola yang lebih partisipatif, di mana petani tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses peremajaan. Dengan demikian, penyelesaian kendala implementasi PSR tidak cukup dengan solusi teknis semata, melainkan membutuhkan intervensi kebijakan yang memperkuat aspek koordinatif, komunikatif, dan insentif bagi petani sawit rakyat.

Peran kelembagaan dalam menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat

Berdasarkan hasil analisis terhadap artikel yang ditinjau, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara struktural bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal, dengan tiga temuan kritis.

Pertama, terjadi asimetri akses program di mana keanggotaan KUD menjadi prasyarat partisipasi, kondisi ini mengakibatkan petani non-anggota tidak tersentuh program PSR. Kedua, lembaga lokal menunjukkan keterbatasan kapasitas pengembangan program

pendukung. KUD Marga Bhakti di Rokan Hilir gagal merancang skema non-PSR bagi petani terdampak, dampaknya tentu akan mengalami penurunan pendapatan selama masa replanting.

Ketiga, kelembagaan berfungsi sebagai mediator konflik kemitraan-khususnya pada disparitas anggaran dan implementasi teknis. Gapoktan berhasil mengurangi sengketa RAB melalui negosiasi berbasis data lapangan

Temuan-temuan tersebut memperjelas bahwa kelembagaan lokal tidak hanya menjadi sarana administratif pelaksana program, tetapi merupakan aktor kunci dalam memastikan inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan dalam pelaksanaan PSR. Ketergantungan pada KUD sebagai satu-satunya pintu masuk justru berpotensi menimbulkan eksklusivitas terhadap petani non-anggota, yang secara struktural memperlemah pemerataan manfaat program. Selain itu, keterbatasan inovasi kelembagaan dalam merancang program alternatif bagi petani terdampak memperlihatkan lemahnya kapasitas adaptif yang sangat dibutuhkan dalam konteks kebijakan publik yang dinamis.

Fungsi mediasi konflik oleh Gapoktan menandai pentingnya lembaga akar rumput dalam meredam potensi gesekan antaraktor, khususnya ketika terjadi ketimpangan informasi atau perbedaan kepentingan antara petani dan mitra pelaksana. Oleh karena itu, keberhasilan Program PSR sangat bergantung pada kemampuan lembaga lokal untuk bertransformasi, tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai agen penguatan posisi tawar petani dan fasilitator keadilan distribusi sumber daya program.

Kesiapan dan partisipasi petani dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap artikel yang ditinjau, secara umum petani sudah layak dalam memperoleh pembiayaan maupun mengikuti Program peremajaan sawit rakyat. namun akses terhadap pembiayaan dan regulasi yang mengharuskan adanya avalis menjadi kendala dalam program PSR. Kemudian artikel lainnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota kelompok termasuk dalam kategori tinggi.

Meskipun petani secara umum layak mengikuti Program PSR, hambatan regulatif terkait pembiayaan, khususnya kewajiban adanya avalis, menjadi tantangan utama. Namun demikian, partisipasi kelompok tani tetap menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan program.

Situasi ini menunjukkan adanya paradoks dalam implementasi Program PSR: di satu sisi, petani memiliki kelayakan dan menunjukkan partisipasi aktif, namun di sisi lain, mereka dihadapkan pada hambatan struktural yang bersumber dari regulasi pembiayaan yang tidak sepenuhnya berpihak. Syarat avalis menjadi bentuk eksklusivitas finansial terselubung yang dapat menghambat akses petani kecil terhadap program yang sejatinya dirancang untuk mereka.

Partisipasi tinggi yang ditunjukkan oleh kelompok tani mencerminkan adanya modal sosial dan semangat kolektif yang kuat di tingkat akar rumput. Namun, apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pembiayaan yang inklusif dan fleksibel, antusiasme tersebut berisiko mengalami demotivasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, kesiapan dan partisipasi petani harus diposisikan bukan sekadar sebagai data teknis, melainkan sebagai dasar pertimbangan penting dalam merumuskan desain ulang skema pembiayaan dan akses PSR agar lebih berkeadilan dan kontekstual.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil telaah terhadap sepuluh artikel ilmiah, implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan multidimensional. Program ini, meskipun secara umum telah menunjukkan efektivitas melalui pelatihan, pendampingan teknis, penerapan Good Agricultural Practices (GAP), serta kemitraan strategis dalam penyerapan hasil panen, masih menghadapi sejumlah kendala serius dalam pelaksanaannya.

Kendala-kendala tersebut meliputi terbatasnya sumber daya manusia, rusaknya alat pendukung, keterbatasan anggaran, durasi peremajaan yang cukup panjang sehingga mempengaruhi keberlanjutan ekonomi petani, lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan petani, serta kurang optimalnya sosialisasi kebijakan. Di sisi lain, peran kelembagaan lokal seperti KUD dan Gapoktan terbukti sangat penting, baik sebagai penentu akses, pengelola program, maupun sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.

Partisipasi petani terhadap Program PSR secara umum tergolong tinggi, menunjukkan antusiasme dan kesiapan mereka. Namun demikian, regulasi pembiayaan yang mengharuskan adanya avalis menjadi penghambat utama dalam mengakses program. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Program PSR tidak hanya bertumpu pada aspek teknis, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas kelembagaan, keberpihakan kebijakan, dan skema pembiayaan yang inklusif.

Dengan demikian, pendekatan yang lebih integratif, adaptif, dan kolaboratif diperlukan dalam pelaksanaan Program PSR, agar mampu menjawab kompleksitas tantangan di lapangan sekaligus memberdayakan petani sawit rakyat sebagai aktor utama dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, R., Nurkhoiry, R., Prima, Z., Nasution, S., & Kurniawan, A. (2017). Analisis Kesiapan petani dan koperasi dalam peremajaan perkebunan kelapa sawit. *J. Pen. Kelapa Sawit*, 25(November 2016), 171–181.
- Arrofi, M. H. (2022). *Implementasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Untuk*. 1–8. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10580>
- Asti, P. D. A., Falatehan, A. F., & Kumala Putri, E. I. (2022). Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (Studi Kasus: KUD Tunas Muda Kabupaten Siak-Riau). *Forum Agribisnis*, 12(2), 126–137. <https://doi.org/10.29244/fagb.12.2.126-137>
- Devi Ayu Hardiningsih, & Dadang Mashur. (2023). Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Bhakti dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 174–181. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2647>
- Dison, R., & Wulansari, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan (Replanting) Perkebunan Kelapa Sawit Didusun Lembah Kuamang Tahun 2019. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 3(1), 35–51. <https://doi.org/10.36355/jppd.v3i1.27>
- Ganadi, E. Y., Gunawan, S., & Firmansyah, E. (2023). Kajian Peremajaan Sawit Rakyat di Perkebunan Rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Agroforetech*, 1(03).
- Husni Asidiq, F., Yumiati, Y., & Nurmalia, A. (2022). Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal AGRIBIS*, 15(2), 2003–2008. <https://doi.org/10.36085/agribis.v15i2.3563>
- Hutasuhut, S. R., Ayu, S. F., & Chalil, D. (2023). Analisis Efektivitas Program Peremajaan Sawit Rakyat Di Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Indonesia. *Agro Bali : Agricultural Journal*, 6(2), 459–469. <https://doi.org/10.37637/ab.v6i2.1126>
- Maharani, A., & Laksmono, B. S. (2021). Peran Gapoktan Karya Bersama Dalam Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Di Bandar Durian, Aek Natas, Labuhan Batu Utara. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jpm.v2i2.1022>
- Nurkamila, R., & Mayarni. (2024). TATA KELOLA PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) PADA LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(1).
- Panggabean, B. T., Hutabarat, S., & Muwardi, D. (2023). Strategi Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Triton*, 14(1).
- Qodriyatun, S. N. (2023). *DILEMA PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT*.
- RI, K. K. (2024). *KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) JASA VERIFIKASI TEKNIS PENCAIRAN DANA PROGRAM PEREMAJAAN*

KELAPA SAWIT TAHUN 2024.

- Sari, B. F., & Prihatin, P. S. (2024). Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 11553–11559.
- Syafira, R., Nasution, Z., & Charloq, C. (2024). Analisis Kendala Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terhadap Potensi Pertumbuhan Ekonomi Petani Sawit Rakyat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 431–441. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2469>
- Yanti, N. N. K. (2023). Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).